

IMPLEMENTASI TEORI *TRIPLE HELIX* SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT CIAMIS PADA SEKTOR WISATA SEJARAH DAN BUDAYA

Syarif Hidayat^a

hidayatsyarif@stiabiru.ac.id

^a STIABI Riyadul 'Ulum, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 5th March 2021

Revised: 22nd July 2021

Accepted: 5th August 2021

Published: 6th August 2021

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.51190/jazirah.v2i1.6>



This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,
Online ISSN: 2774-3144

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata laksana program peningkatan perekonomian pada sektor wisata sejarah dan budaya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan satuan capaian visi Bupati Ciamis, periode 2019-2024 yakni mantapnya perekonomian kemandirian kesejahteraan untuk semua. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif studi kasus dengan tahapan menentukan tema penelitian, menentukan narasumber, wawancara mendalam (*indepth interview*), menganalisis, membuat laporan penelitian. Hasil penelitian tersebut, pemerintah Kabupaten Ciamis serius dalam menciptakan ekosistem perekonomian berbasis wisata sejarah dan budaya. Dengan cara membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dengan tata kerjanya menggunakan teori triple helix dimana dalam pelaksanaannya, akademisi, swasta dan pemerintah berperan satu sama lain sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Sehingga terjadi sebuah siklus kolaborasi sebagai daya dukung pengembangan perekonomian wisata sejarah dan budaya.

KATA KUNCI

Wisata Budaya, Sejarah, Triple Helix, BPPD

ABSTRACT

This study aims to determine the governance of economic improvement programs in the historical and cultural tourism sector which is managed by the Government of the Ciamis Regency in realizing the unit of vision achievement of the Regent of Ciamis, 2019-2024 the economy of prosperity independence for all. The research method used is a qualitative ethnographic approach with the stages of determining the research theme, determining the sources, in-depth interviews (*in-depth interviews*), analyzing, making research reports. The results of the study, the government of Ciamis Regency is serious about creating an economic ecosystem based on historical and cultural tourism. By establishing a Regional Tourism Promotion Board (BPPD) with its work procedures, it uses the triple helix theory, wherein its implementation, academics, the private sector, and the government play roles in accordance with their capacities and capabilities. So that there is a cycle of collaboration as a support for the development of the historical and cultural tourism economy.

KEYWORDS

Cultural Tourism, History, Triple Helix, BPPD.

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat menempatkan kepariwisataan menjadi sektor unggulan dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Tak heran saat ini pemerintah terus melakukan penguatan perekonomian rakyat yang dipadukan dengan peran antara akademisi dan swasta untuk mendapatkan sebuah akselerasi berkelanjutan hingga terciptanya ekosistem pariwisata.

Pemerintah Jawa Barat menjadikan sektor pariwisata menjadi bagian penting dalam pembangunan perekonomian. Dengan mewujudkan visinya yakni Jabar Juara Lahir dan Batin kebijakan pemerintah pusat dan daerah keduanya menjadikan sektor pariwisata menjadi pintu gerbang meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat terfokus pada peningkatan sektor wisata berbasis sejarah dan budaya sebagai daya tarik peminatan wisatawan.

Pembangunan ekonomi masyarakat tersebut memprioritaskan terhadap tata kelola sistem regulasi, pemberdayaan, permodalan, investasi, penelitian yang dikembangkan yang diterapkan hingga akar rumput masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) untuk mengkolaborasikan ketiga unsur yakni akademisi, swasta, dan pemerintah sebagai metode pelaksanaan pariwisata menggunakan konsep teori *Triple Helix*.

Konsep *Triple Helix* ini kerap digunakan di negara-negara maju dalam mensinergikan antara akademisi, bisnis dan pemerintah. Kemudian teori *Triple Helix* ini dianggap sangat relevan dengan kondisi perkembangan pembangunan terutama sebagai kerangka normatif antara peneliti untuk pemahaman interaksi antara aktor kunci dalam inovasi sebuah sistem. Selain itu teori *Triple Helix* ini juga menjadi bagian dari upaya strategi yang digunakan pemerintah maupun lembaga yang mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam setiap gerak langkah serta kebijakan umumnya. Selanjutnya ketiga unsur itu dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga.

Konsep *Triple Helix* ini digabungkan dengan peran masyarakat sipil dan masyarakat berbasis media. Hal tersebut sangat relevan dengan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan tata kerjanya, menciptakan (1) inovasi yang kompetitif serta membutuhkan interaksi dari sistem pendidikan, (2) sistem ekonomi, 3) lingkungan alam, (4) masyarakat berbasis media dan budaya (juga masyarakat sipil), (5) dan sistem politik ¹.

Indikator dari konsep teori *Triple Helix* merupakan bagian dari interaksi antara universitas, industri dan pemerintah yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Etzkowitz & Leydesdorff. Konsep ini sering digunakan sebagai kerangka normatif antara peneliti untuk pemahaman interaksi antara aktor kunci dalam inovasi sebuah sistem. Selain itu juga menjadi strategi umum yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan. Salah satu klaim utama

¹ Aflit Nuryulia Praswati, "Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi," *Prosiding Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2017 "Perkembangan Konsep dan Riset E-Business di Indonesia* (2017): 690-705.

dari tesis *Triple Helix* adalah bahwa antara akademisi, industri dan pemerintah menyediakan kondisi yang optimal untuk inovasi².

Kemudian peran pemerintah baik kepedulian pemerintah daerah dalam mengapresiasi masyarakat terutama terhadap kelima pilar utama model pengembangan industri dan ekonomi kreatif, yakni: 1) *industry*; 2) *technology*; 3) *resources*; 4) *institution*; dan 5) *financial intermediary* akan lebih menstimulasi munculnya talenta-talenta baru di daerah³.

Pihak yang dianggap mampu memberikan bantuan untuk pengembangan industri kreatif yaitu kolaborasi antara *intellectuals*, *government* dan *business* atau yang biasa disebut dengan konsep *Triple Helix*. Kolaborasi dari tiga aktor *Triple Helix* ini dianggap mampu meningkatkan kreativitas, ide dan skill⁴.

Penelitian ini ditargetkan menjadi sebuah naskah akademik dan memiliki dua tujuan, yakni umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini yakni untuk memperkuat secara substansial dari penguatan, pengembangan perekonomian Ciamis secara inklusif yang saling terkoneksi antara hulu dan hilir. Penguatan inilah yang nantinya akan mewujudkan sebuah tata kelola kepariwisataan terutama dalam pengembangan wisata sejarah dan budaya yang berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya alam dan manusia. Mewujudkan visi mantapnya kemandirian ekonomi untuk semuanya akan terlaksana secara terukur. Penelitian ini bertujuan khusus yakni menjadikan sebuah instrumen yang memandu penyusunan rencana aksi, baik program maupun kegiatan, hulu hingga hilir dalam rangka perwujudan ekosistem pariwisata sejarah dan budaya Ciamis yang substansial melalui rute penguatan, peningkatan pembangunan perekonomian inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dengan tahapan yakni menentukan tema, studi dokumentasi, wawancara mendalam, analisis kasus, interpretasi dan membuat laporan penelitian. Objek penelitian ini dilakukan di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis. Penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana peran BPPD dalam mengimplementasikan teori *Triple Helix* sebagai strategi pengembangan perekonomian masyarakat ciamis pada sektor wisata sejarah dan budaya.

² Henry Etzkowitz and Loet Leydesdorff, "The Dynamics of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations," *Research Policy* 29, no. 2 (2000): 109–123.

³ Herie Saksono, "Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah," *Jurnal Bina Praja* 04, no. 02 (2012): 93–104.

⁴ H Etzkowitz, *The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action*, NetLibrary, Inc (Routledge, 2008), <https://books.google.co.id/books?id=mo-MB6u-AMQC>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Triple Helix Representasi Tata Kelola Pembangunan Daerah

Perekonomian merupakan salah satu hajat hidup orang banyak dalam sebuah tatanan kehidupan kenegaraan. Tujuan negara salah satunya yakni memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagai unsur struktur sosial masyarakatnya. Tak heran, pemerintah kerap mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

Masyarakat merupakan bagian dari subjek sejarah dan budaya tentu memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu dalam setiap komunitas masyarakat terdapat adat, tradisi dan budaya yang diterapkan sebagai pedoman mereka dalam melaksanakan kehidupan sosialnya.

Membahas daerah Ciamis tak lepas dari topik pembahasan mengenai budaya dan sejarahnya. Apalagi, Ciamis digadang-gadang sebagai pusat ibukota Kerajaan Galuh dari sejak abad ke 14. Situs peninggalan sejarah menyimpan kebudayaan yang hingga kini masih terjaga dan dilestarikan. Bahkan banyak situs cagar budaya dijadikan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya yang selalu dikunjungi oleh para wisatawan. Bukan hanya wisatawan saja, melainkan para pakar ahli sejarah banyak melakukan penelitiannya di daerah ciamis tersebut. Atas dasar itulah, ciamis menjadi daerah tujuan wisata budaya dan sejarah di Jawa Barat.

Berdasarkan deskripsi di atas, Ciamis sangatlah berpeluang menjadi daerah tujuan wisata sejarah di nusantara. Apalagi bila dalam pelaksanaan pengembangan tata laksana kepariwisataannya tiga unsur penting seperti akademisi, swasta dan pemerintah berkolaborasi.

Pada tataran regulasi, tata kelola pariwisata sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, ada sembilan unsur terdiri dari, unsur kepariwisataan jumlah empat orang unsur profesi kepariwisataan keterwakilan dari Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI), dan ASPERAPI. Untuk unsur asosiasi penerbangan keterwakilan satu orang dari ASITA yang saat ini hanya dipegang oleh perusahaan BUMN yakni Garuda *Airlines*. Kemudian dari unsur profesi dua orang terdiri dari Asita dan HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia) dan terakhir dari unsur akademisi atau pakar ahli sebanyak dua orang.

Setelah diambil kebijakan dalam implementasinya di Kabupaten Ciamis, Sembilan unsur tersebut menyesuaikan dengan ketersediaan unsur yang ada di daerah. Unsur kepariwisataan diwakilkan kepada pemilik jasa kepariwisataan, bidang hiburan, bidang akomodasi perhotelan, bidang transportasi wisata, bidang wisata minat khusus, jasa media wisata serta akademisi. Khusus untuk bidang penerbangan, karena Ciamis tidak memiliki penerbangan maka, digantikan dari unsur lainnya yakni unsur bidang transportasi wisata.

Peraturan perundang-undangan tersebut diperkuat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan

Promosi Pariwisata Indonesia⁵, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi Pariwisata Jawa Barat⁶, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761)⁷.

Dari sejumlah dasar hukum di atas, secara tegas bahwa pariwisata merupakan indikator penting dalam tata laksana peningkatan perekonomian masyarakat sebagai subjek pembangunan. Tentu hal demikian perlu dipertegas dengan regulasi tata kerja pariwisata di tingkat kabupaten/kota.

Untuk mendukung hal di atas, Kabupaten Ciamis telah memiliki peraturan perundangan yang mengatur kehidupan kepariwisataan. Dengan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) No 19 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Peraturan ini mendukung sekali visi Bupati Ciamis, periode 2019-2024, yakni peningkatan ekonomi inklusif. Oleh sebab itu untuk mengimplementasikan penguatan, pengembangan, peningkatan perekonomian inklusif salah satu capaian pembangunan prioritas Bupati Ciamis periode 2019-2024 diperlukan adanya daya dukung secara terintegrasi antara internal dan eksternal yang saling terkoneksi satu sama lainnya untuk menciptakan hegemonisasi ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan mengakar pada sendi-sendi kehidupan masyarakat⁸.

Dalam rangka penguatan, pengembangan perekonomian inklusif satuan capaian visi Bupati Ciamis periode 2019-2024 dalam bidang pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis menerapkan konsep teori *Triple Helix* sebagai representasi dari upaya konektifitas yang melibatkan peran akademik, swasta dan pemerintah yang saling menguatkan dalam pelaksanaan kinerja BPPD sebagai lembaga yang mengurus pengembangan pariwisata Ciamis.

Indikator Konsep *Triple Helix* Dalam Penerapan Tata Kelola Wisata Budaya Ciamis

Hasil penelitian peneliti memberikan batasan mengenai bagaimana tata kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis, konsep *Triple Helix* (Akademisi, Swasta, dan Pemerintah) akan saling menguatkan dan terkoneksi satu sama lainnya.

⁵ Indonesia Keputusan Presiden, "Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Keppres 22 Tahun 2011" (2011): 6.

⁶ Gubernur Jawa Barat, *SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA JAWA BARAT*, 2011.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Pemerintah Republik Indonesia*, 1996, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK EwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkatal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.

⁸ Bupati Ciamis, *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan*, 2011.

Berdasarkan hasil data dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis. Dalam pelaksanaan tata kelola kepariwisataan, menggunakan konsep teori *Triple Helix* dari Etzkowitz diantaranya:

A. Akademisi: Inovasi riset dan pengembangan

Peran akademisi dalam kinerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis yakni melakukan kerja-kerja penelitian dalam pengembangan wisata sejarah dan budaya. Penelitian ini dilakukan untuk dijadikan standarisasi wisata sejarah dan budaya berdasarkan data otentik yang didapatkan kondisi masyarakat secara kulturalnya. Selain untuk meneliti sejarah daripada objek wisata berikut dengan budayanya, akademisi tersebut berperan sebagai penentu kebijakan mengenai objek wisata yang dapat diekspos secara besar atau harus dilakukan penataan terlebih dahulu. Karena dalam tata laksana kepariwisataan pelayanan kepada wisatawan dan pengunjung itu adalah hal yang paling utama. Seperti, pemandu wisata dan pengelola wisata harus bersertifikasi sebagai legalitas kelayakan pengelola pariwisata.

Selain itu, saat pengembangan desa wisata pun perlu adanya pendampingan. Sebelum masuk pada tataran regulasi, harus dilakukan kajian serta analisis terlebih dahulu, karena desa wisata ini akan menjadi ujung tombak dari peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan khususnya. Secara garis besar, peran akademisi dalam tata kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sangat vital sebagai unsur kebijakan yang sangat mendasar. Hasil kajian penelitian di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis peran akademisi belum berperan secara maksimal. Hal ini cukup mendasar karena BPPD dibentuk pada awal tahun 2020. Namun, berdasarkan studi dokumentasi rancangan programnya sudah mengarah pada salah satu indikator konsep *Triple Helix*.

B. Swasta

Setelah adanya kajian dari para akademisi mengenai standarisasi objek wisata sejarah dan budaya, memunculkan program unggulan yang terintegrasi dengan visi pemerintah. Langkah selanjutnya yakni penanaman modal serta kreatifitas inovasi pada objek wisata sejarah dan budaya yang melibatkan, komunitas UMKM, komunitas seni budaya, peran media massa, serta para pengembang teknologi yang dapat disinergikan. Hal ini pun sejalan dengan program BPPD yakni pengembangan inovasi promosi berbasis digital. Apalagi, BPPD ini memiliki jaringan digital berupa website media massa yang memuat informasi, berita seputar destinasi wisata sejarah dan budaya bersifat ajakan kepada para pengunjung. Jaringan digital ini yakni jamparing.id. Tidak hanya pada ruang digital saja, BPPD pun memiliki jaringan masyarakat pariwisata yang tersebar di seluruh desa di kabupaten ciamis. Artinya, ekosistem pariwisata sudah terjadi di Ciamis. Maka, BPPD memiliki peran selain mengekspos destinasi wisata secara digital melainkan pula secara offline membina kelompok, komunitas pengelola pariwisata. Kuncinya adalah investasi dan inovasi.

C. Pemerintah

Berdasarkan konsep *Triple Helix* yang diterapkan dalam tata laksana Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis, memiliki 5 peran yakni regulasi, infrastruktur/suprastruktur, pemberdayaan, dan kerjasama.

Dalam aspek regulasi, pemerintah sebagai satuan dari tata laksana kenegaraan memiliki peran yang cukup sentral. Yakni menerbitkan regulasi yang mengacu pada naskah akademik, serta kebutuhan daripada swasta, masyarakat sebagai subjek pembangunan ekonomi inklusif pada sektor wisata sejarah dan budaya.

Dalam pelaksanaan kepariwisataan harus pula memperhatikan ketersediaan dari infrastruktur dan suprastruktur. Karena kunci dari pariwisata ada tiga A. Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas (sarana prasarana). Dari ketiga rumus kunci tersebut ada di peran pemerintah.

Dalam aspek pemberdayaan, pariwisata itu tidak lepas dari peran masyarakat. Pasalnya, masyarakat inilah yang memiliki budaya serta sejarah. Terutama dalam pengembangan desa wisata yang saat ini sedang terus dikembangkan secara massif di berbagai daerah di Indonesia. Maka, pemberdayaan adalah salah satu indikator utama dalam pelaksanaan program BPPD Kabupaten Ciamis.

Terkait kerjasama, pemerintah memiliki peran untuk mengkoneksikan lembaga yang dapat memberikan daya dukung pelaksanaan kepariwisataan. Seperti dalam menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perbankan, dan lintas wilayah instansi pemerintah, diantaranya Kota Banjar, Pangandaran, Tasikmalaya, Garut. Daerah ini akan menjadi salah satu wilayah yang dapat menjadi penyangga serta penopang perekonomian pada sektor pariwisata.

Untuk mengetahui sejauh mana BPPD Ciamis dalam melakukan ruang gerakannya, sebagai implementasi teori *Triple Helix* yang menjadi acuan dasar pelaksanaan kinerjanya. Jelas, tidak asal penerapan program saja. Dibutuhkan daya ukur sebagai target dari peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan wisata sejarah dan budaya di Ciamis. Bukan hanya itu, regulasi yang digunakan apakah mengarah terhadap teori yang digunakan atau tidak. Perlu kiranya dilakukan analisis efektivitas program yang bersinergi satu sama lain yang saling terkoneksi. Berikut disertakan tabel *Roadmap* Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis.

Tabel 1. Roadmap BPPD Kab. Ciamis

No	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR	HASIL CAPAIAN	STAKEHOLDER
1	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Pemberdayaan SDM	Pusat Informasi Wisata (Tourism Information Centre/TIC)	Pembentukan Manajemen Pusat Informasi Pariwisata Yang Mandiri	SOP	SK Kelembagaan (SOP) Dan Struktur Pengurus	Dinas Pariwisata
			Media Centre Dinas Pariwisata "Jamparing"	Pembentukan Manajemen "Jamparing" Sebagai Media Partner Dinas Pariwisata	SOP	Sk Kelembagaan (Sop) Dan Struktur Pengurus	Dinas Pariwisata
		Informasi Area Destinasi	Petunjuk Arah Destinasi Wisata	Info Tujuan Wisata	Rambu-Rambu Petunjuk Arah	Iklim Pariwisata Terbentuk	Dinas Perhubungan - UPTD Dinas Pariwisata
			Billboard Peta Wisata	Memberikan Informasi Letak Obyek Wisata	Peningkatan Kunjungan Wisata	Iklim Pariwisata Terbentuk	UPTD Dinas Pariwisata
			Billboard Agenda Wisata	Informasi Agenda Wisata Tahunan	Peningkatan Kunjungan Wisata	Iklim Pariwisata Terbentuk	UPTD Dinas Pariwisata
		Pusat Informasi Wisata (Tourism Information Centre/TIC)	Industri Pariwisata	Konten TIC	Data Base	MoU	Pengelola TIC

(Sumber: Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019)

KESIMPULAN

Sumber daya manusia menjadi indikator dalam tata kelola pariwisata sejarah dan budaya sebagai salah satu sektor peningkatan perekonomian masyarakat Ciamis. Kemudian peran serta pihak akademisi, swasta dan pemerintah yang saling terkoneksi, serta kolaborasi berdasarkan kapasitas dan kapabilitas masing-masing akan menjadi siklus saling mengisi peran dalam inovasi, kreatifitas sehingga wisata sejarah dan budaya menjadi sebuah industri penunjang perekonomian. Ketiga unsur yang diterapkan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis dengan menggunakan teori *triple helix* akan menjadi energi bersama dalam memajukan Ciamis. Akan tetapi, penerapan teori *triple helix* yang diterapkan BPPD Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya terlaksana. Penyebabnya yakni lembaga tersebut baru terbentuk. Akan tetapi, meninjau dari program BPPD Ciamis ini menguatkan pada konsep *triple helix* sebagai acuan dasar tata kerjanya. Penelitian merekomendasikan agar lembaga ini harus memperkuat ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Tata laksana pengelolaan pariwisata memerlukan pakar yang memiliki keahlian yang telah diakui secara hukum. Selain itu, penguatan kerjasama dengan lembaga eksternal akan

memperkuat daya dukung internal lembaga yang mengedepankan asas manfaat terhadap pemberdayaan SDM yang dimiliki serta hubungan komunikasi dengan pemerintah harus terjalin dengan baik agar mendapatkan dukungan secara anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bupati Ciamis. *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata*, 2011.
- Etzkowitz, H. *The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action*. NetLibrary, Inc. Routledge, 2008.
<https://books.google.co.id/books?id=mo-MB6u-AMQC>.
- Etzkowitz, Henry, and Loet Leydesdorff. "The Dynamics of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations." *Research Policy* 29, no. 2 (2000): 109-123.
- Gubernur Jawa Barat. *SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI PARIWISATA JAWA BARAT*, 2011.
- Keputusan Presiden, Indonesia. "Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Keppres 22 Tahun 2011" (2011): 6.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata*. Pemerintah Republik Indonesia, 1996.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.
- Praswati, Aflit Nuryulia. "Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi." *Prosiding Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2017 "Perkembangan Konsep dan Riset E-Business di Indonesia"* (2017): 690-705.
- Saksono, Herie. "Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah." *Jurnal Bina Praja* 04, no. 02 (2012): 93-104.